

## ANALISIS PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI RT 11 RW 01 KELURAHAN DUREN SAWIT, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR

Fauziya Bagawat Sari<sup>1</sup>, Nadia A.S. Renhoran<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana

Email : fauziyabagawatsari@gmail.com

Submit : 15 Januari 2024, Review : 6 april 2024, Terbit : 12 juni 2024

### Abstrak

*Permukiman kumuh menjadi salah satu permasalahan utama di perkotaan yang memerlukan penanganan terpadu (Corburn & Sverdlik, 2017; UN-Habitat, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan untuk menganalisis kondisi serta strategi penanganan kawasan kumuh di Duren Sawit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi serta strategi penanganan kawasan kumuh di Duren Sawit. Metode yang digunakan meliputi GIS, skoring berdasarkan regulasi, dan analisis SWOT. Hasil menunjukkan kawasan termasuk kategori Kumuh Ringan dengan permasalahan utama pada akses air bersih dan infrastruktur. Rekomendasi difokuskan pada peningkatan layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Permukiman Kumuh, Penanganan Kumuh.*

### Abstract

Slum settlements are one of the major urban problems requiring an integrated approach This study aims to analyze the conditions and management strategies for slum areas in Duren Sawit. This study aims to analyze the conditions and management strategies for slum areas in Duren Sawit. The methods used include GIS, regulation-based scoring, and SWOT analysis. The results indicate that the area falls into the “Mild Slum” category, with the main issues being access to clean water and infrastructure. Recommendations focus on improving basic services and community empowerment.

Keywords: Slum Settlements, Slum Management.

## PENDAHULUAN

Permukiman dan perumahan daerah-daerah di Indonesia mengalami penurunan kualitas lingkungan hunian, baik lingkungan perumahan dan permukiman yang di kota maupun desa. Banyak dijumpai pada kawasan permukiman yang padat, seperti lingkungan permukiman kumuh perkotaan khususnya Kota Jakarta. Penggunaan lahan secara optimal wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Pasal 28 Ayat 1 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang tersebut juga merupakan kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap

Perumahan dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh, baik melalui program pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta adanya kendala regulasi dalam proses penataan kawasan. Program penanganan yang telah diterapkan di berbagai daerah juga menunjukkan hasil yang beragam, bergantung pada efektivitas pelaksanaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana strategi yang telah diterapkan di RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit dalam mengatasi permasalahan ini.

Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada kondisi eksisting permukiman kumuh di wilayah tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan, serta upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan.

Isu dan permasalahan permukiman kumuh di RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit adalah sebagai berikut

- a. Isu terkait Permukiman Kumuh di wilayah RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit adalah :
  - 1) Wilayah RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit merupakan penggunaan lahan permukiman masyarakat (perkampungan) dengan kepadatan bangunan tidak teratur, kualitas sarana/prasarana rendah, dan ketidak teraturan lingkungan.
  - 2) Permasalahan yang terjadi berdampak pada buruknya citra kota dan juga akan berdampak luas untuk kondisi kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat.
- b. Permasalahan :
  - 1) Kepadatan bangunan tinggi dengan luas rumah rata-rata kurang lebih 40 m<sup>2</sup>.
  - 2) Memiliki daerah cekungan, sehingga rawan banjir setiap musim hujan.
  - 3) Mata pencaharian penduduk rata-rata tidak tetap, antara lain : buruh harian lepas, Pedagang Kaki Lima, Ojek Online, Swasta dan lain-lain.
  - 4) Masyarakat belum terlayani air bersih dari PDAM (hanya 6 rumah dari 57 rumah), sementara 57 rumah masih menggunakan air tanah.
  - 5) PKL disepanjang BKT telah memanfaatkan badan jalan, trotoar, dan drainase untuk berjualan.
  - 6) Akses jalan terbatas, dengan lebar 3 - 4 meter sehingga hanya cukup 1 kendaraan roda 4 yang melintas dan tidak keseluruhan beraspal.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh didefinisikan sebagai kawasan dengan kondisi hunian tidak layak, kepadatan tinggi, dan minim infrastruktur dasar (UN-Habitat, 2020). Faktor utama meliputi akses air bersih, sanitasi, dan kualitas bangunan.

### Penanganan Permukiman Kumuh

Penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan melalui upgrading, redevelopment, dan relokasi (Corburn & Sverdluk, 2017). Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian oleh Manurung (2019) menunjukkan bahwa penataan kawasan kumuh meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian lain menekankan pentingnya kebijakan lokal dalam penanganan kumuh (Izzatusholekha et al., 2023).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif dalam hal ini karena sumber data yang dianalisis berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan, overlay kesesuaian tata ruang dengan menggunakan arcgis, metode SWOT terkait strategi penanganan kawasan permukiman kumuh, dan pembobotan/skorning berdasarkan variabel dan indikator permukiman kumuh sesuai ketentuan

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dan Permen PUPR No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kuliatas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. Sistem pembobotan tersebut sebagai berikut :  
 Perumahan dan Permukiman Kumuh.

**Tabel 1.** Kriteria, Variabel, Parameter/ Indikator dan Bobot Kekumuhan

No	Kriteria	Variabel	Parameter/Indikator	Bobot
1.	Vitalitas Non Ekonomi	Sesuai Tata Ruang	Sesuai 25 %	3
			Sesuai 25 – 50 %	2
			Sesuai 50 %	1
		Kepadatan Bangunan	> 100 unit/ha	3
			80 – 100 unit/ha	2
			< 80 unit/ha	1
		Kepadatan Penduduk	> 500 jiwa/ha	3
			400 – 500 jiwa/ha	2
			< 400 jiwa/ha	1
No	Kriteria	Variabel	Parameter/Indikator	Bobot
2.	Vitalitas Ekonomi	Kondisi Jalan Lingkungan	Sangat buruk > 70 %	3
			Buruk 50 – 70 %	2
			Baik < 50 %	1
		Kondisi Drainase Lingkungan	Genangan > 50 %	3
			Genangan 25 – 50 %	2
			Genangan < 25 %	1
		Kondisi Air Minum	Pelayanan < 30 %	3
			Pelayanan 30 – 60 %	2
			Pelayanan > 60 %	1
		Kondisi Air Limbah	Pelayanan < 30 %	3
			Pelayanan 30 – 60 %	2
			Pelayanan > 60 %	1
		Kondisi Persampahan	Pelayanan < 50 %	3
			Pelayanan 50 – 70 %	2
			Pelayanan > 70 %	1
		Dominasi Status Tanah	Sertifikat hak milik	3
			Sertifikat hak guna bangunan	2
			Girik (Bukan SHM/SHGB)	1

**Sumber:** Permen PUPR No 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kuliatas terhadap

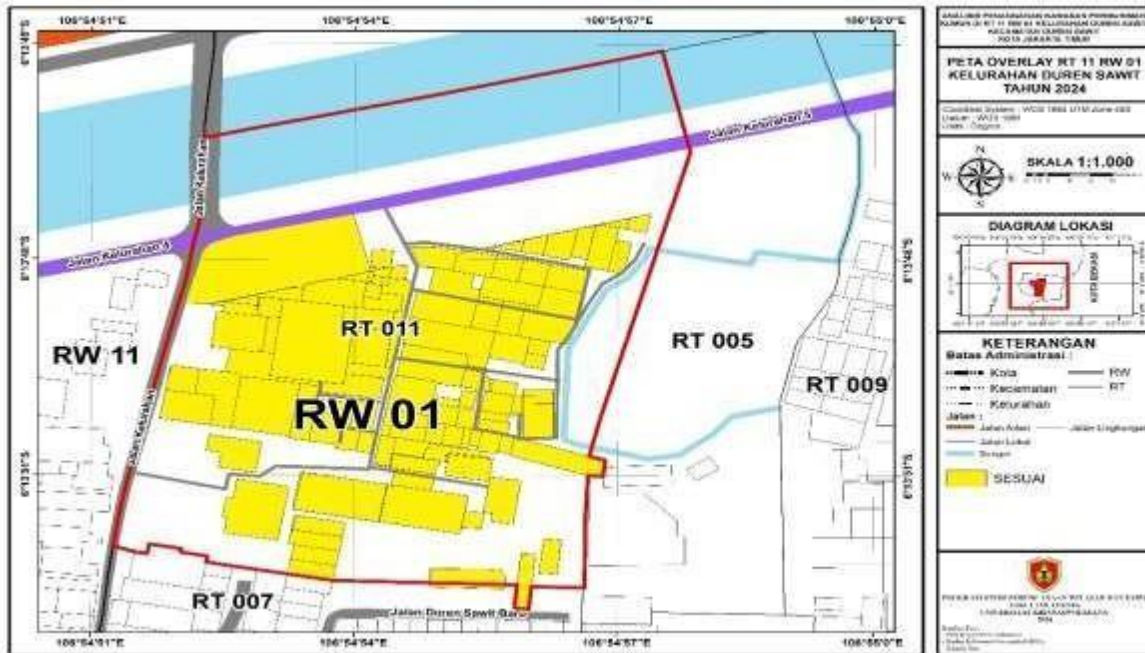
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

a. Analisis Kesesuaian Tata Ruang

Hasil dari analisis diperoleh lokasi permukiman kumuh berada dalam Zona Sarana Pelayanan Umum (Sarana Pendidikan (SPU-1), Sarana Rekreasi dan Olahraga (SPU4), Sarana Peribadatan (SPU-6)), Perkantoran Pemerintahan (KT-1) dan Ruang Terbuka

Hijau Kota (RTH -3) dan diperoleh ketidaksesuaian dengan struktur ruang pada lokasi PKL yang berjualan di koridor Jl. Kelurahan 5 BKT dengan jaringan jalan kolektor primer, hal tersebut disebabkan oleh PKL yang memanfaatkan badan jalan, trotoar, dan diatas drainase untuk berjualan.

Gambar 1. Peta Overlay RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit



b. Analisis Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan Permukiman Kumuh di RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit ini merupakan kondisi eksisting kawasan sesuai dengan kriteria identifikasi kawasan kumuh. Kriteria tersebut meliputi Kesesuaian Tata Ruang, Kepadatan Bangunan, Kepadatan Penduduk, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Air Minum, Kondisi Air

Limbah, Kondisi Pengelolaan Persampahan dan Dominasi Status Tanah. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan sebagaimana uraian dalam tinjauan pustaka berikut merupakan rentang nilai tingkat klasifikasi yang didapatkan untuk setiap kelas yakni: • Bukan Kawasan Kumuh : 0–8, 75

- Kawasan Kumuh Ringan : 8, 76–17, 50
- Kawasan Kumuh Sedang : 17, 51–26, 25
- Kawasan Kumuh Berat : 26, 26

**Gambar 2.** Peta Penggunaan Lahan



Dari Penilaian dihasilkan tingkat kekumuhan dari kategori kumuh berat, sedang, dan ringan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.** Hasil Klasifikasi Tingkat Kekumuhan di RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit

No	Kriteria	Variabel	Parameter/Indikator	Nilai	Tingkat Klasifikasi
1.	Vitalitas Non Ekonomi	Sesuai Tata ruang	Sesuai 50 %	1	Kawasan Kumuh Ringan
		Kepadatan Bangunan	< 80 unit/ha	1	
		Kepadatan Penduduk	< 400 jiwa/ha	1	
2.	Vitalitas Ekonomi	Kondisi Jalan Lingkungan	Baik < 50 %	1	

No	Kriteria	Variabel	Parameter/Indikator	Nilai	Tingkat Klasifikasi
		Kondisi Persampahan	Pelayanan > 70 %	1	
		Dominasi Status Tanah	Setifikat HGB	2	
	Jumlah Total Bobot			12	
		Kondisi Drainase Lingkungan	Genangan < 25 %	1	
		Kondisi Air Minum	Pelayanan < 30 %	3	
		Kondisi Air Limbah	Pelayanan > 60 %	1	

Sumber : Hasil Analisis Lapangan, 2025

**STRATEGI PENANGANAN** dapat menyusun rencana strategi arahan penanganan permukiman kumuh berdasarkan memaksimalkan Strategi arahan penanganan kawasan permukiman kekuatan (strength), dan peluang (opportunities), kumuh di RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit ini yang secara bersamaan meminimalisir kelemahan menggunakan analisis SWOT dengan tujuan untuk (weaknesses), dan ancaman (threats). **Tabel 3.** Matriks SWOT

<p><b>Faktor Internal</b></p> <p>1. Jenis bangunan rumah tinggal 1. Pelayanan Air Minum dari rata-rata permanen. PDAM masih rendah, hanya 2. Jalan lingkungan kondisi baik. 10,5 %.</p> <p>3. Sistem drainase sudah terpadu dengan BKT, tidak teratur, hanya bisa diakses 4. Memiliki TPS. pejalan kaki.</p> <p>5. Tersedianya Sarana Pelayanan 3. Belum dilakukan pengangkutan Umum (Pukesmas, Kantor sampah oleh petugas disetiap Kelurahan, Kantor Pemadam rumah.</p> <p>Kebakaran, Masjid dan Taman Lingkungan).</p>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <p>2. Jalan lingkungan sempit, dan</p> <p>4. Kondisi bangunan masyarakat masih ada yang tidak layak</p> <p>5. Kondisi drainase terjadi sedimentasi, di bawah rumah penduduk, dan sempit. <b>Faktor</b></p>
	<p><b>Eksternal</b></p>	<p><b>Strategi (S-O)</b></p>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <p>1. Kebijakan PerGub DKI .. 1. Penataan bangunan 1. Pengembangan Sistem Jaringan RT 11 RW 01 masuk masyarakat agar layak huni. instalasi air minum/bersih PDAM, kategori Kawasan Kumuh 2. Peningkatan jaringan jalan dan perluasan sambungan</p>	<p><b>Strategi (S-O)</b></p>	<p><b>Strategi (W-O)</b></p>

- Ringan. lingkungan. rumah-rumah.
- Kesesuai Tata Ruang 3. Dilakukan peningkatan dan 2. Peningkatan dan pengaturan kawasan permukiman pembangunan sistem drainase sistem jaringan jalan. kumuh ini telah sesuai di kawasan permukiman. 3. Pengelolaan persampahan warga
  - Tata Ruang. 4. Memperluas jangkauan dilakukan secara rutin dan
  - Lokasi yang strategis pelayanan air minum/bersih terjadwal untuk mengurangi didukung dengan jalur dampak penumpukan sampah.

<p>4. BKT, dan sistem jaringan jalan yang memadai. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola permukiman kumuh.</p>	<p>5. PDAM yang dapat dicapai 100 %. Peningkatan pengelolaan persampahan yang terpadu.</p>	<p>4. Penataan bangunan masyarakat oleh pihak-pihak terkait agar layak huni. 5. Dilakukan pemeliharaan dan pembangunan sistem drainase secara terpadu.</p>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aksesibilitas terganggu berdampak pada jalur BKT dengan adanya PKL.</li> <li>Kualitas lingkungan menurun.</li> <li>Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana lingkungan. Masih terdapat beberapa bangunan yang tidak layak. Jika tidak ada pemeliharaan secara rutin oleh pihak-pihak terkait, akan berdampak dengan adanya genangan air pada setiap musim hujan.</li> </ol>	<p><b>Strategi (S-T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas bangunan layak huni.</li> <li>Peningkatan kualitas jalan lingkungan.</li> <li>Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sistem drainase.</li> <li>Peningkatan pengelolaan persampahan dengan penyediaan sarana dan prasarana persampahan.</li> <li>Menggali sumber dana alternatif dari pihak-pihak terkait untuk pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan kumuh.</li> </ol>	<p><b>Strategi (W-T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu dilakukan penataan dan penertiban PKL yang berdampak pada aksesibilitas warga.</li> <li>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.</li> <li>Memanfaatkan peluang sumber daya alternatif dari pihak-pihak terkait untuk pemenuhan sarana dan prasarana.</li> <li>Peningkatan kualitas bangun permukiman agar layak huni.</li> </ol>

Sumber : Hasil Analisis Lapangan, 2025

Tabel 4. Matrix Internal Factor Analysis Strategic (IFAS)

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan</b>			
Jenis bangunan rumah tinggal rata-rata permanen.	0.2	2	0.4
Jalan lingkungan kondisi baik.	0.2	2	0.4

Sistem drainase sudah terpadu dengan BKT.	0.2	2	0.4
Memiliki TPS.	0.2	1	0.2
Tersedianya Sarana Pelayanan Umum (Puskesmas, Kantor Kelurahan, Kantor Pemadam Kebakaran, Masjid, dan Taman Lingkungan).	0.2	2	0.4
<b>Total</b>	1		1,8
<b>Kelemahan</b>			
Pelayanan Air Minum dari PDAM masih rendah yaitu 10,5%.	0.2	3	0.6
Jalan lingkungan sempit, tidak teratur, hanya bisa diakses pejalan kaki.	0.2	4	0.8
Belum dilakukan pengangkutan sampah oleh petugas disetiap rumah.	0.2	4	0.8
Kondisi bangunan masyarakat masih ada yang tidak layak huni.	0.2	3	0.6
Kondisi drainase terjadi sedimentasi, di bawah rumah penduduk, dan sempit.	0.2	3	0.6
<b>Total</b>	1		3,5

Sumber : Hasil Analisis Lapangan, 2025

**Tabel 5.** Matrix Internal Factor Analysis Strategic (IFAS)

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan</b>			
Jenis bangunan rumah tinggal rata-rata permanen.	0.2	2	0.4
Jalan lingkungan kondisi baik.	0.2	2	0.4
Sistem drainase sudah terpadu dengan BKT.	0.2	2	0.4
Memiliki TPS.	0.2	1	0.2
Tersedianya Sarana Pelayanan Umum (Puskesmas, Kantor Kelurahan, Kantor Pemadam Kebakaran, Masjid, dan Taman Lingkungan).	0.2	2	0.4
<b>Total</b>	1		3,5
<b>Kelemahan</b>			
Pelayanan Air Minum dari PDAM masih rendah yaitu 10,5%.	0.2	3	0.6
Jalan lingkungan sempit, tidak teratur, hanya bisa diakses pejalan kaki.	0.2	4	0.8
Belum dilakukan pengangkutan sampah oleh petugas disetiap rumah.	0.2	4	0.8

Kondisi bangunan masyarakat masih ada yang tidak layak huni.	0.2	3	0.6
Kondisi drainase terjadi sedimentasi, di bawah rumah penduduk, dan sempit.	0.2	3	0.6
<b>Total</b>	1		2

Sumber : Hasil Analisis Lapangan, 2025

## KONSEP PENANGANAN

### *Konsep Peremajaan Kota dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman*

Berdasarkan hasil analisis klasifikasi kekumuhan pada RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit masuk dalam kategori kawasan kumuh ringan, dan hasil analisis kebijakan direkomendasikan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peremajaan :

1. Peningkatan Air Minum PDAM
2. Peningkatan Saluran Drainase
3. Peningkatan Jalan Lingkungan
4. Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Sesuai substansi dalam kajian pustaka bahwa Pola penanganan kawasan kumuh memiliki tiga kategori yakni, peremajaan, pemugaran dan permukiman kembali. Kawasan pemukiman kumuh RW 01 Kelurahan Duren Sawit termasuk dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, lokasi pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan Kawasan Permukiman terpadu.

Peremajaan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan perombakan dengan perubahan yang mendasar dan penataan yang menyeluruh terhadap kawasan hunian yang tidak layak huni tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kawasan permukiman kumuh di wilayah RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit dengan menggunakan standar kriteria dan indikator kekumuhan sebagaimana tercantum dalam tabel 2, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut

:

1. Kesesuaian tata ruang dalam RDTR Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022–2042 telah sesuai peruntukan sebagai Zona Sarana Pelayanan Umum (Sarana Pendidikan (SPU-1), Sarana Rekreasi dan Olahraga (SPU-4), Sarana Peribadatan (SPU-6)), Perkantoran Pemerintahan (KT-1) dan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH -3) dan diperoleh ketidaksesuaian dengan struktur ruang pada lokasi PKL yang berjualan di koridor Jl. Kelurahan 5 BKT dengan jaringan jalan kolektor primer, hal tersebut disebabkan oleh PKL yang memanfaatkan badan jalan, trotoar, dan diatas drainase untuk berjualan.

Hal ini menjadi penyebab terjadinya hambatan samping (kemacetan, parkir liar dan penyempitan jalan) dengan bobot 1.

2. Kepadatan Bangunan masuk kategori di bawah 80 unit/ha dengan bobot 1.
3. Kepadatan Penduduk masih di bawah 400 jiwa/ha dengan bobot 1.
4. Kondisi Jalan Lingkungan masuk dalam kategori baik < 50 % dengan bobot 1.
5. Kondisi Drainase Lingkungan masuk dalam genangan < 25 % dengan bobot 1.
6. Kondisi Air Minum masuk kategori pelayanan < 30 % dengan bobot 3.
7. Kondisi Air Limbah masuk kategori pelayanan > 60 % dengan bobot 1.
8. Kondisi Pengelolaan Persampahan masuk kategori pelayanan > 70 % dengan bobot 1.
9. Dominasi Status Tanah masuk kategori Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan bobot 2.
10. Jika di total nilai bobot 12 dapat dikatakan masuk dalam klasifikasi kumuh ringan.

## REKOMENDASI

2.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari berbagai aspek kawasan kumuh, maka rekomendasi untuk mewujudkan peningkatan kawasan permukiman kumuh menjadi layak huni dan memberikan kenyamanan, keamanan dan lingkungan yang <sup>3.</sup> berkelanjutan, maka rekomendasi adalah sebagai berikut : <sup>4.</sup>

1. Mengoptimalkan fungsi peruntukan ruang sebagai sub zona permukiman kepadatan sangat tinggi (R-1) melalui kolaborasi dari berbagai pihak-pihak terkait dalam <sup>5.</sup> pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Mengusulkan peningkatan jalan atau gang dengan aspal hotmik di wilayah RT 11 RW 01 Kelurahan Duren Sawit kepada Sudin Bina Marga Kota Jakarta Timur, dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelola sampah rumah tangga. Pengembangan sistem jaringan pipa air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air bersih dari PDAM mencapai 100 %.

Melakukan penataan bangunan dan penghijauan lingkungan permukiman.

## DAFTAR PUSTAKA

Corburn, J., & Sverdlik, A. (2017). *Slum Upgrading and Health Equity*.

*UN-Habitat*. (2020). World Cities Report.

Manurung, H. (2019). Dampak Penataan

Permukiman Kumuh. Izzatusholekha, I. (2023). Kebijakan Permukiman Kumuh.

Hadasa Manurung dkk (2019). Dampak Penataan Permukiman Kumuh

Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kawasan Bagan Deli Belawan. *Jurnal Inovasi*

*Vol. 16 No. 1*. Corburn, J., & Sverdilk, A. (2017). *Slum Upgrading and Health Equity*,

*International Journal of Environmental Research and Public Health* University of California, Berkeley, CA 94720, USA.

Izzatusholekha, I., Salam, R., & Furqon, M. (2023). Kebijakan Penataan

Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014.

*Jurnal SWATANTRA* Vol. XX No 1 Januari 2023 pp. 73-82. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah 2030;

Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta. UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Perment PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau. Permen Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. BPS Jakarta Timur Dalam Angka Tahun 2024. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.

Kelurahan Duren Sawit, Laporan Tahunan Kelurahan Duren Sawit Tahun 2023.

Sudin Sumber Daya Air, Kota Administrasi Jakarta Timur, Laporan Kejadian Banjir Jakarta Timur Tahun 2020.